

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal pemerintah. Menurut FASB, dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan.

Dengan demikian perusahaan akan semakin mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan operasi perusahaannya. Namun di era persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini perusahaan dan profesi auditor sama-sama dihadapkan pada tantangan-tantangan berat. Mereka harus mempertahankan eksistensinya di peta persaingan dengan perusahaan kompetitor atau rekan seprofesinya

Perusahaan menginginkan *Unqualified Opinion* sebagai hasil dari laporan audit, agar performanya terlihat bagus di mata publik sehingga ia dapat menjalankan operasinya dengan lancar. Menurut Chow, dkk dalam Kawijaya, dkk (2002), manajemen perusahaan berusaha menghindari opini wajar dengan pengecualian karena bisa mempengaruhi harga pasar saham

Namun, laporan keuangan yang diaudit adalah hasil proses negosiasi antara auditor dengan klien. Disinilah auditor berada dalam situasi yang dilematis, di satu sisi auditor harus bersikap independen dalam memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, namun di sisi lain dia juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya agar kliennya puas. Dengan pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Posisinya yang unik seperti itulah yang menempatkan auditor pada situasi yang dilematis sehingga dapat mempengaruhi kualitas auditnya.

Negara yang dikelola oleh pemerintah mencakup dana yang cukup besar jumlahnya. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi.

Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (BPKP) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Standar audit sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar

umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor“. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk auditor, kualitas kerja di lihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Tan dan Alison, 1999). Penelitian yang dilakukan oleh Alim, dkk (2007) menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hasil ini konsisten dengan penelitian De Angelo dalam Alim dkk (2007), Mayangsari (2003). Selain itu, menurut Alim, dkk (2007), interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Independensi auditor adalah inti dari integritas sebuah proses audit. Saat auditor dan klien melakukan proses negosiasi terhadap penemuan salah saji material dalam laporan keuangan, disinilah independensi auditor diperlukan. Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen.

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa

yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota

bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bisa, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain (Mulyadi, 2002).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu pengalaman auditor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nataline (2007), menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit. Auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Norman dalam Yusuf, (2012), mengenai pengaruh pengalaman pada kompleksitas permasalahan serta *audit judgment*, menemukan bahwa auditor yang berpengalaman (*expertise*), akan lebih jelas merinci masalah yang dihadapi dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada *auditor judgment*. Hal ini dipertegas oleh Haynes et al dalam Herliansyah dan Ilyas (2006) yang menemukan bahwa pengalaman audit yang dipunyai auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan (*judgment*) yang diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Pengetahuan seorang auditor dalam bidang audit juga dapat mempengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan. Menurut Brown dan Stanner dalam Mardisar dan Sari (2007), perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah

kantor inspektorat tingkat kabupaten Magetan, Ngawi, Ponorogo, pada tahun 2012 dan menambahkan variabel Motivasi audit.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta pendapat dalam penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul

**“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT Di LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH”.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Atas dasar latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah independensi auditor mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit?
2. Apakah obyektifitas auditor mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit?
3. Apakah pengalaman kerja mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit?
4. Apakah pengetahuan auditor mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit?
5. Apakah integritas auditor mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit?
6. Apakah motivasi auditor mempunyai pengaruh positif terhadap

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumuasan masalah tersebut,maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
2. Untuk menguji apakah obyektifitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
3. Untuk menguji apakah pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
4. Untuk menguji apakah pengetahuan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
5. Untuk menguji apakah integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
6. Untuk menguji apakah motivasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

### **D. MANFAAT HASIL PENELITIAN**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah untuk menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah

## 2. Manfaat dibidang praktik

Manfaat bagi pemerintah daerah dari penelitian ini adalah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah